BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menciptakan dan mewujudkan hasil kerja pemerintahan yang baik serta memuaskan diperlukan adanya tata kelola pemerintahan yang baik atau sering disebut *good government governance*. Pemerintah daerah terus berupaya melakukan berbagai perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu pengelolaan keuangan yang digunakan oleh para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang kinerja atau hasil kerja yang telah dicapai pemerintah daerah dalam tugasnya menyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satu bentuk upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kinerja pemerintahan yang optimal adalah dengan menyempurnakan sistem akuntansi dan administrasi secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik khususnya organisasi pemerintah yang berada pada dinas-dinas dan badan lembaga pemerintah menunjukkan kualitas kerja yang baik, serta selalu bersikap profesional dalam melakukan kegiatan manajemen keuangan pemerintah daerah.

Selanjutnya laporan keuangan yang telah disajikan oleh pemerintah daerah akan dipakai sebagai referensi atau rujukan dalam pengambilan keputusan oleh beberapa pihak yang berkepentingan dalam hal ini auditor pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, didalam laporan keuangan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah terdapat informasi yang bermanfaat dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para pemakai (Xu *et al*, 2003) dalam Sukmaningrum, 2012). Dengan demikian penyajian informasi didalam laporan keuangan berupa perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dituntut untuk lebih diperhatikan oleh pemerintah daerah. Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah juga harus memuat informasi tentang akuntansi yang memenuhi karakteristik kualitatif, hal ini sebagaimana seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni: informasi yang relevan, andal, dapat dipercaya,

dapat dibandingkan serta dapat dipahami berkenaan dengan posisi keuangan dan seluruh data transaksi yang di catat oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Apabila kriteria kualitatif dalam penyajian informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut terpenuhi seperti sebagaimana yang disyaratkan, maka dapat dikatakan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah telah mampu diwujudkan. Informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria tersebut sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka akan memungkinkan terjadi kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakfektifan. Sehingga dapat mengakibatkan potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan dan menyebabkan kerugian daerah

Akan tetapi kondisi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Berdasarkan data ihtisar hasil pemeriksaan semester I Tahun 2020 menunjukkan, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 541 LKPD yang dilaporkan dalam IHPS I Tahun 2020 menemukan 5.175 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang meliputi 1.729 (33%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.338 (45%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 1.108 (22%) permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern. Selain itu . Berdasarkan data ihtisar hasil pemeriksaan semester I Tahun 2020 tercatat bahwa sebanyak 5.324 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, hal ini antara lain yaitu permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan (berdampak finansial) sebanyak 3.221 permasalahan sebesar Rp1,52 triliun, serta penyimpangan administrasi (tidak berdampak finansial) sebanyak 2.103 permasalahan sebagaimana disajikan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Kelompok Temuan Akibat Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan
Perundang-undangan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2019

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (Miliar Rupiah)
1	Kerugian Daerah	2.147	898,30
2	Potensi Kerugian Daerah	359	342,86
3	Kekurangan Penerimaan	715	285,75
Berdampak Finansial		3.221	1.526,91
4	Penyimpangan Administrasi	2.103	-
Total ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan		5.324	1.526,91

(sumber: www.bpk.go.id – IHPS I Tahun 2020)

Hasil berbeda terkait perkembangan opini LKPD selama 5 Tahun yang menunjukkan peningkatan yang lebih baik. Berdasarkan hasil audit atas LKPD selama 5 tahun, dari tahun 2015-2019, menunjukkan hasil pemeriksaan keuangan daerah semakin membaik setiap tahun, hal ini didukung oleh data dari BPK yang menyatakan bahwa persentase opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK semakin bertambah, sedangkan opini wajar dengan pengecualian (WDP), dan opini tidak wajar (TW), serta tidak memberikan pendapat (TMP) semakin menurun dari tahun ke tahun.

Tabel 1.2
Perkembangan Opini LKPD Tahun 2015-2019

Tahun	OPINI							
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%
2015	313	58	194	36	4	1	31	5
2016	378	70	141	26	0	0	23	4
2017	411	76	113	21	0	0	18	3
2018	443	82	86	16	0	0	13	2
2019	445	90	50	9	0	0	6	1

*) sampai dengan semester I 2020 (sumber: www.bpk.go.id)

Daftar opini LKPD berdasar tingkat pemerintahan (Kabupaten dan Kota) tersaji dalam tabel 1.2 menunjukkan bahwa opini WTP pemerintahan kabupaten maupun kota menunjukkan hasil yang baik, hal ini terlihat dari jumlah WTP pemerintahan kabupaten maupun kota yang terus meningkat tiap tahunnya.

Tabel 1.3
Opini LKPD Tahun 2014-2019 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
(Kabupaten dan Kota)

Pemda	Kabupaten					Kota				
	Tahun	WTP	WD P	TW	TMP	JML	WTP	WDP	TW	TM P
2015	54%	38%	1%	7%	100%	65%	33%	0%	2%	100%
2016	66%	29%	0%	5%	100%	77%	22%	0%	1%	100%
2017	72%	24%	0%	4%	100%	86%	14%	0%	0%	100%
2018	79%	18%	0%	3%	100%	90%	9%	0%	1%	100%
2019	88%	11%	0%	1%	100%	94%	6%	0%	0%	100%

(sumber: www.bpk.go.id – IHPS I Tahun 2020)

Hasil evaluasi oleh BPK menunjukkan bahwa LKPD yang diberi opini WTP dan WDP secara umum telah memiliki pengendalian intern yang memadai. Sedangkan untuk LKPD yang mendapat opini TW dan TMP dalam penyajian informasi laporan keuangan masih perlu mendapat perhatian terkait kehandalan dalam pengendalian intern. BPK menemukan beberapa kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas:

1. Pencatatan yang tidak cermat
2. Penyusunan laporan yang tidak sesuai dengan ketentuan
3. Keterlambatan penyampaian laporan
4. Pelaporan tidak memadai
5. Pelaporan belum didukung SDM yang memadai.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut diatas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa syarat kriteria penyajian informasi laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah belum terpenuhi secara penuh. Mengingat bahwa karakteristik kualitatif merupakan unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diantaranya dipengaruhi oleh penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia serta sistem pengendalian intern.

Penelitian ini mereplikasi penelitian Tawaqal dan Suparno (2017) tentang Pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia serta sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Studi kasus di Pemerintah Kota Banda Aceh.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Tawaqal dan Suparno (2017) adalah lokasi penelitian. Pada penelitian ini lokasi yang diteliti yaitu pegawai SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Madiun. Dengan perbedaan lokasi penelitian tersebut diharapkan memberikan hasil yang mampu mendukung hasil penelitian terdahulu.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pegawai OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Madiun)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2. Untuk membuktikan pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
3. Untuk membuktikan pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Madiun untuk dijadikan masukan dan pertimbangan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Madiun guna meningkatkan kinerja dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
2. Bagi peneliti selanjutnya
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam pembuatan penelitian selanjutnya, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi.